Journal of Education, Cultural and Politics
Volume 6 No 4 2026
e-ISSN: 2798 - 6020

Penguatan kapasitas kepemimpinan perangkat nagari dan tokoh masyarakat berbasis *civic engagement* dalam mewujudkan ketahanan sosial nagari

***Suryanef, Fatmariza, Henni Muchtar, Monica Tiara, Irwan Hamdi, Oktaviani Puspita Sari**
Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Corresponding Author: ***Suryanef**
E-mail: suryanef@fis.unp.ac.id

Abstract

Nagari social resilience is a crucial aspect of maintaining stability and community well-being. Nagari officials and community leaders play a strategic role in fostering social resilience through participatory and inclusive leadership. Consequently, there is a need for community service initiatives aimed at enhancing the leadership capacity of these officials and leaders—grounded in the principles of civic engagement—to strengthen the nagari social resilience. This initiative has three primary objectives: 1) To conduct participatory leadership training for nagari officials and community leaders, with the goal of increasing resident involvement in decision-making processes; 2) To provide guidance to the nagari in formulating policies rooted in civic engagement that can be integrated into local governance; and 3) To encourage collaboration among the nagari government, the community, and other stakeholders in building social resilience. The program will be implemented over the course of one year through a combination of training and mentoring, structured into six methodological stages: pre-testing, exposition, analysis, coaching and field-based collaboration, group work, presentation of results, and post-testing.

Article History

Received: 30 Nov 2023

Accepted: 09 Dec 2025

Published: 25 Nov 2026

Keywords:

Social resilience, leadership, civic engagement

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
©2026 by Author.

PENDAHULUAN

Nagari Lambah, yang terletak di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, memiliki posisi strategis sebagai jalur penghubung utama antara Padang dan Pekanbaru. Lokasi ini menjadikan Nagari Lambah sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial yang dinamis, dengan berbagai potensi serta tantangan dalam aspek ketahanan sosial masyarakatnya. Berdekatan dengan Kota Bukittinggi serta dikelilingi oleh desa-desa wisata, Nagari Lambah mengalami perkembangan pesat, baik dari segi ekonomi, pariwisata, maupun mobilitas penduduk. Nagari Lambah merupakan salah satu nagari di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Secara Geografis, Nagari Lambah memiliki luas 3,2 kilometer persegi atau 10,44 persen dari luas wilayah Kecamatan Ampek Angkek. Nagari Lambah berjarak 0,6 kilometer dari ibu kota kecamatan, 75 kilometer dari ibu Kota Kabupaten dan 99 kilometer dari Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat. Nagari Lambah terdiri dari 3 jorong, yakni: Koto Hilalang, Koto Malapah dan Lambah.

Keunggulan geografis ini memberikan peluang besar bagi pengembangan ekonomi berbasis komunitas dan potensi desa wisata. Struktur alam yang indah, dengan latar belakang Gunung Marapi serta hamparan persawahan yang luas, semakin memperkuat daya tarik Nagari Lambah sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan. Kondisi geografis geografis tersebut diikuti dengan fasilitas penunjang pemerintahan dan pelayanan untuk masyarakat berupa; fasilitas Pendidikan yang terdiri dari; SD 3 unit (Negeri), SMA 1 unit (Negeri), 1 unit Fasilitas Kesehatan Puskesmas Pembantu dan 1 unit Polindes.

Keunggulan geografis yang dijelaskan diatas memberikan peluang besar bagi pengembangan ekonomi berbasis komunitas dan potensi desa wisata. Struktur alam yang indah, dengan latar belakang Gunung Marapi serta hamparan persawahan yang luas, semakin memperkuat daya tarik Nagari Lambah sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam aspek sosial dan tata kelola masyarakat. Tingginya arus mobilitas penduduk serta keberagaman latar belakang sosial dapat memicu perubahan pola kehidupan masyarakat, melemahnya kontrol sosial, serta meningkatnya potensi penyakit sosial seperti kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan pergeseran nilai-nilai budaya lokal. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan penguatan kapasitas kepemimpinan perangkat nagari dan tokoh masyarakat berbasis *civic engagement*. Kepemimpinan yang kuat dan partisipatif sangat dibutuhkan untuk menjaga ketahanan sosial masyarakat serta memastikan bahwa perkembangan ekonomi dan pariwisata di Nagari Lambah tetap selaras dengan nilai-nilai budaya dan identitas lokal. Selain itu, pengelolaan usaha masyarakat yang lebih terstruktur serta regulasi yang mendukung keberlanjutan sektor ekonomi menjadi hal penting dalam memastikan kesejahteraan masyarakat nagari secara keseluruhan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Nagari Lambah mulai dari tingkat urbanisasi dan perubahan sosial yang cepat, meningkatnya resiko penyakit sosial, tantangan dalam pengelolaan dan regulasi usaha, serta kesenjangan dalam kepemimpinan dan partisipasi masyarakat. Masalah urbanisasi dan perubahan sosial muncul karena Nagari Lambah berdekatan dengan Kota Bukittinggi dan berada di jalur utama Padang- Pekanbaru menyebabkan tingginya mobilitas penduduk. Banyaknya kontrakan dan rumah sewa di Nagari Lambah, terutama karena lokasinya yang berada di antara desa wisata, menarik

banyak pendatang dari berbagai daerah. Hal ini berdampak pada, tingginya arus masuk penduduk pendatang berpotensi mengubah struktur sosial masyarakat yang sebelumnya homogen menjadi lebih heterogen, sehingga memunculkan tantangan dalam menjaga identitas dan nilai-nilai sosial budaya nagari. Selain itu, memicu terjadinya pergeseran nilai-nilai lokal, khususnya dalam praktik adat dan budaya, akibat pengaruh dari pendatang yang memiliki latar belakang sosial dan budaya yang berbeda.

Sebagai daerah yang dekat pusat keramaian pasar dan kawasan wisata Kota Bukittinggi, Nagari Lambah menjadi tempat persinggahan banyak orang, termasuk pelaku usaha dan wisatawan. Hal ini berpotensi meningkatkan masalah sosial seperti pergaulan bebas, meningkatnya kriminalitas, perjudian, dan penyalahgunaan narkoba. Keberadaan penginapan rumahan yang berkembang pesat membuka peluang ekonomi bagi warga, tetapi juga dapat menjadi potensi munculnya praktik yang bertentangan dengan norma sosial masyarakat nagari jika tidak diawasi dengan baik. Banyaknya kontrakan untuk pendatang membuat kontrol sosial masyarakat nagari menjadi lebih lemah, karena tidak semua penghuni memiliki ikatan emosional dan sosial yang kuat dengan masyarakat setempat.

Lambah terkenal sebagai sentra usaha pengrajin kerupuk dan pakaian khas, yang merupakan sektor ekonomi penting bagi masyarakat. Namun, kurangnya regulasi dan pendampingan usaha menyebabkan potensi ekonomi ini belum optimal, baik dalam hal pemasaran, inovasi produk, maupun keberlanjutan usaha. Banyaknya usaha rumahan dan industri kecil belum sepenuhnya dikelola secara profesional, sehingga ada tantangan dalam hal hygiene produksi, legalitas usaha, serta daya saing produk di pasar yang lebih luas. Pengembangan Nagari Lambah sebagai desa wisata memiliki potensi besar mengingat struktur alamnya yang indah, dengan latar belakang Gunung Marapi dan persawahan yang luas. Namun, pengelolaan wisata yang belum maksimal serta kurangnya koordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya menjadi tantangan tersendiri.

Kesenjangan dalam Kepemimpinan dan Partisipasi Masyarakat muncul karena dinamika sosial dan ekonomi yang cepat menuntut kepemimpinan yang adaptif dan berbasis partisipasi masyarakat (*civic engagement*). Namun, belum semua perangkat nagari dan tokoh masyarakat memiliki kapasitas kepemimpinan partisipatif yang mampu mendorong keterlibatan warga dalam mengelola berbagai permasalahan di nagari. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam forum-forum pengambilan keputusan menyebabkan kebijakan lokal kurang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, terutama dalam bidang ketahanan sosial dan tata kelola ekonomi berbasis komunitas.

Menyikapi berbagai permasalahan di atas, maka perlu dilaksanakan pengabdian masyarakat dalam bentuk pendampingan. Melalui pendampingan berbasis riset dan inovasi, program ini bertujuan untuk membangun kepemimpinan perangkat nagari dan tokoh masyarakat di Nagari Lambah yang lebih adaptif dan responsif dalam menghadapi dinamika sosial yang kompleks. Oleh karena itu, tim pengabdi dari Prodi PPKn Universitas Negeri Padang (UNP), yang memiliki keahlian dalam bidang pendidikan kewarganegaraan, tata kelola pemerintahan, dan penguatan karakter masyarakat, akan memberikan sinergitas berbasis *civic engagement* untuk memperkuat peran kepemimpinan perangkat nagari dan tokoh masyarakat dalam menjaga ketahanan sosial. Pendekatan ini akan dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, serta penyusunan strategi kebijakan berbasis partisipasi

masyarakat, sehingga para pemimpin lokal tidak hanya memiliki wawasan yang lebih luas, tetapi juga mampu mengambil langkah-langkah konkret dalam mengelola dinamika sosial di Nagari Lambah.

METODE PENELITIAN

Program "Penguatan Kapasitas Kepemimpinan Perangkat Nagari dan Tokoh Masyarakat Berbasis *Civic Engagement* dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial Nagari" dilaksanakan melalui enam tahapan utama, yaitu Pre-tes, Ekspos, Analisis, Coaching dan Kolaborasi Lapangan, Kerja Kelompok, Presentasi Hasil, dan Pos-tes.

Tahap Pre-tes

Tahap awal ini bertujuan untuk mengukur pemahaman awal dan kebutuhan spesifik perangkat nagari serta tokoh masyarakat terkait kepemimpinan berbasis *civic engagement*. Instrumen pre-tes berupa survei dan wawancara untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman mereka terhadap partisipasi warga dan tata kelola sosial yang inklusif, observasi kondisi sosial nagari, termasuk pola komunikasi antara perangkat nagari dan masyarakat, dan studi dokumen kebijakan lokal untuk memahami bagaimana peraturan nagari saat ini mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Data ini akan menjadi dasar dalam menyusun pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan setiap nagari.

Tahap Ekspos

Pada tahap ini, tim pengabdi memberikan pemaparan teori dan praktik terbaik mengenai:

1) Kepemimpinan partisipatif dan inklusif dalam pemerintahan nagari.
2) Strategi *civic engagement*, yaitu bagaimana perangkat nagari bisa membangun keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sosial
3) Model ketahanan sosial nagari, termasuk upaya pencegahan konflik sosial dan penguatan kohesi komunitas

Ekspos dilakukan dalam bentuk seminar interaktif yang mendorong diskusi dan refleksi kritis dari peserta.

Tahap Analisis

Peserta diajak untuk menganalisis kondisi kepemimpinan dan ketahanan sosial nagari mereka sendiri melalui metode FGD (Focus Group Discussion) untuk memetakan tantangan dalam membangun

civic engagement di nagari masing-masing dan analisis SWOT kepemimpinan perangkat nagari dalam menghadapi masalah sosial Diskusi berbasis studi kasus, dengan contoh-contoh keberhasilan *civic engagement* di daerah lain. Analisis ini membantu peserta mengenali pola kepemimpinan yang perlu diperkuat dan strategi yang dapat diterapkan di nagari mereka.

Tahap Coaching dan Kolaborasi Lapangan

Tahap ini dilakukan dengan pendekatan berbasis pengalaman langsung. Perangkat nagari dan tokoh masyarakat akan dibimbing dalam menerapkan *civic engagement* di lapangan, dengan kegiatan:

1. Pendampingan dalam penyelenggaraan musyawarah nagari yang lebih partisipatif
2. Kolaborasi dengan komunitas lokal untuk menginisiasi program ketahanan sosial, seperti revitalisasi kegiatan gotong royong berbasis teknologi

3. Simulasi dan role-playing dalam menyelesaikan konflik sosial dengan pendekatan deliberatif

Pendekatan ini memastikan peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mempraktikkan *civic engagement* dalam kepemimpinan mereka.

Tahap Kerja Kelompok

Peserta dibagi menjadi kelompok berdasarkan jorong masing-masing untuk menyusun rencana aksi strategis dalam mengimplementasikan *civic engagement*. Kegiatan utama meliputi:

1. Penyusunan kebijakan atau program keterlibatan masyarakat yang bisa diterapkan di nagari.
2. Pembuatan strategi komunikasi untuk meningkatkan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan.
3. Penyusunan roadmap penguatan ketahanan sosial, berdasarkan hasil analisis sebelumnya.

Setiap kelompok akan didampingi oleh fasilitator untuk memastikan program yang dirancang realistis dan dapat diimplementasikan.

Presentasi Hasil dan Pos-tes

Pada tahap akhir, peserta mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka dalam bentuk proposal kebijakan atau program *civic engagement* yang dapat diterapkan di nagari masing- masing. Presentasi ini akan dievaluasi oleh tim pengabdi dan sesama peserta untuk mendapatkan umpan balik konstruktif. Setelah presentasi, peserta akan mengikuti post-tes [11] untuk mengukur peningkatan pemahaman mereka. Evaluasi juga akan mencakup Perubahan pola pikir dan keterampilan kepemimpinan peserta dan Komitmen untuk mengimplementasikan program yang telah dirancang. Rencana keberlanjutan program setelah kegiatan selesai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian awal mengenai penguatan tata Kelola nagari, pemberdayaan Masyarakat, peningkatan kapasitas kepemimpinan dan literasi digital

Salah satu hasil riset menunjukkan bahwa model pembangunan nagari berbasis kearifan lokal dapat menjadi pendekatan efektif dalam mengarusutamakan gender dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan nagari. Hal ini berimplikasi pada kebijakan pembangunan nagari yang cenderung masih didominasi oleh perspektif patriarki dan kurang melibatkan kelompok rentan dalam proses pengambilan Keputusan. Di sisi lain, tantangan dalam kepemimpinan perempuan juga menjadi perhatian dalam konteks pemerintahan nagari. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan serta menciptakan ruang yang lebih setara dalam kepemimpinan nagari.

Selain itu, kapasitas pemerintah lokal dalam melakukan inovasi kebijakan pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang menentukan efektivitas pengelolaan nagari. Keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya akses terhadap teknologi digital sering kali menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan yang berbasis data dan bukti. Temuan ini relevan dalam merancang strategi pendidikan yang adaptif di nagari, terutama dalam mengembangkan sistem pembelajaran berbasis digital yang dapat diakses oleh masyarakat

luas. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan nagari melalui pelatihan tata kelola dapat berkontribusi pada efektivitas administrasi pemerintahan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

Dalam aspek ekonomi, penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) menunjukkan bahwa meskipun BUMNag memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, masih terdapat berbagai hambatan yang menghambat optimalisasi peranannya. Hambatan tersebut meliputi lemahnya manajemen usaha, kurangnya inovasi dalam pengembangan produk, serta keterbatasan akses ke pasar dan modal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas manajerial dan kewirausahaan bagi pengelola BUMNag menjadi solusi strategis untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi lokal.

Gambar 1. Sambutan ketua tim Pengabdi



Sumber: Dokumentasi peneliti

Tahapan pelaksanaan pengabdian

Program *"Penguatan Kapasitas Kepemimpinan Perangkat Nagari dan Tokoh Masyarakat Berbasis Civic Engagement dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial Nagari"* telah dilaksanakan di Nagari Lambah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Kegiatan berlangsung selama beberapa tahap yang dirancang secara sistematis untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan adaptif dan partisipatif perangkat nagari serta tokoh masyarakat. Berikut hasil kegiatan pada setiap tahapan:

Tahap Pre-test

Pada tahap awal, dilakukan pengukuran pemahaman dan identifikasi kebutuhan perangkat nagari serta tokoh masyarakat melalui survei, wawancara, dan observasi lapangan. Temuan awal ini menjadi dasar penyusunan strategi pelatihan yang kontekstual dan sesuai kebutuhan Nagari Lambah

- Sebanyak **22 peserta** (terdiri atas perangkat nagari, Bamus, tokoh masyarakat, dan pemuda) mengikuti pre-tes.
- Hasil survei awal menunjukkan bahwa **63,6% peserta** memiliki pemahaman dasar tentang *civic engagement*, namun belum memahami secara mendalam penerapannya dalam tata kelola pemerintahan nagari.
- Observasi menunjukkan komunikasi antara perangkat nagari dan masyarakat masih bersifat satu arah dan belum memfasilitasi partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan.
- Dokumen kebijakan lokal (Peraturan Nagari dan RPJM) belum secara eksplisit mengatur mekanisme partisipasi masyarakat deliberatif.

Tahap Ekspos

Tahap Ekspos dilaksanakan dalam bentuk seminar interaktif yang menghadirkan sejumlah narasumber ahli dari berbagai bidang untuk memperluas wawasan peserta mengenai *civic engagement* dan ketahanan sosial nagari. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan landasan teoretis dan inspirasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi oleh perangkat nagari dan tokoh masyarakat Nagari Lambah. Tahap ini terbagi ke dalam dua sesi utama, masing-masing dipandu oleh moderator dan diikuti dengan sesi tanya jawab aktif antara peserta dan narasumber seperti terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2. Penyampaian materi oleh narasumber



Sumber: Dokumentasi peneliti

Tahap ekspos ini berperan penting dalam memberikan kerangka konseptual dan inspirasi strategi implementatif bagi peserta. Materi dari para narasumber tidak hanya memperluas wawasan peserta mengenai ketahanan sosial nagari, tetapi juga menghubungkannya dengan tantangan nyata yang dihadapi Nagari Lambah, seperti mobilitas penduduk, konflik sosial, dan ketimpangan ekonomi. Evaluasi pasca-ekspos menunjukkan bahwa 87% peserta menyatakan kegiatan ekspos sangat bermanfaat, dan 78% peserta mulai mengidentifikasi peluang penerapan strategi *civic engagement* di jorong masing-masing seperti terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3. Peserta memberikan tanggapan



Sumber: Dokumentasi peneliti

Tahap Analisis

Tahap ini difokuskan pada analisis kondisi aktual kepemimpinan dan ketahanan sosial nagari melalui FGD dan SWOT analysis. Tiga kelompok jorong secara terpisah melaksanakan FGD dengan mengangkat tiga isu utama yaitu lemahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah, kurangnya kolaborasi lintas kelompok sosial, dan tantangan pengelolaan urbanisasi. Pada tahap ini mulai merancang strategi peningkatan kohesi sosial melalui revitalisasi kegiatan adat dan gotong royong. Tahap analisis ini memperkuat kesadaran kolektif akan potensi lokal sebagai modal sosial penting dalam membangun ketahanan nagari.

Tahap coaching dan kerja kelompok

Pada tahap ini, peserta difasilitasi untuk menerapkan prinsip *civic engagement* secara langsung dalam konteks nyata. Tim pengabdi mendampingi pelaksanaan musyawarah nagari yang lebih partisipatif, dengan melibatkan perangkat nagari, tokoh masyarakat, pemuda, dan perwakilan perempuan. Kegiatan kolaboratif berupa revitalisasi kegiatan gotong royong dilakukan di Jorong Koto Malapah, dengan partisipasi lebih dari 60 warga. Simulasi penyelesaian konflik sosial dilakukan melalui *role-playing*, membahas kasus pergeseran nilai adat akibat masuknya pendatang. Dari tahap ini, peserta menunjukkan peningkatan kemampuan fasilitasi musyawarah dan teknik komunikasi deliberatif. Banyak peserta mengakui bahwa praktik langsung ini membantu mereka lebih memahami penerapan konsep *civic engagement*.

Pada tahap kerja kelompok, peserta dibagi berdasarkan jorong untuk menyusun rencana aksi strategis. Kelompok Koto Hilalang fokus pada penyusunan kebijakan lokal yang mendukung partisipasi masyarakat dalam musyawarah nagari. Kelompok Koto Marapak merancang program komunikasi publik untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat muda melalui media sosial dan kegiatan budaya. Kelompok Lambah menyusun *roadmap* penguatan ketahanan sosial yang mencakup revitalisasi nilai lokal, digitalisasi pelayanan, dan

pembentukan forum komunikasi warga. Semua kelompok difasilitasi untuk memastikan rencana aksi bersifat realistis dan terintegrasi dengan RPJM Nagari Lambah. Tiga draft rencana aksi berhasil disusun pada tahap ini.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat di Nagari Lambah selain merupakan bagian dari tri dharma perguruan tinggi, hal ini juga menjadi bukti bahwa kampus harus mampu menjawab persoalan dan dinamika di tengah masyarakat. Pelaksanaan program pengabdian ini telah menghasilkan beberapa capaian penting. Pertama, Teridentifikasinya kebutuhan nyata dan permasalahan prioritas dalam tata kelola nagari. Kedua, Peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan partisipatif peserta. Ketiga, Terbentuknya draft rencana aksi strategis berbasis *civic engagement* di tiga jorong. Terakhir, Meningkatnya komitmen kolaboratif antara perangkat nagari, tokoh masyarakat, dan pemuda dalam memperkuat ketahanan sosial. Program ini tidak hanya memberikan peningkatan kapasitas teknis, tetapi juga membangun kesadaran kolektif untuk menjadikan *civic engagement* sebagai fondasi ketahanan sosial Nagari Lambah.

Selain itu, Hasil pelaksanaan program menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap prinsip kepemimpinan partisipatif dan strategi keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal. Selain itu, kegiatan ini mendorong lahirnya formulasi kebijakan nagari yang lebih responsif terhadap dinamika sosial, terbentuknya forum komunikasi masyarakat, serta meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya pelestarian nilai budaya lokal sebagai basis ketahanan sosial. Publikasi video kegiatan dan penyusunan draft luaran lainnya menjadi langkah awal dalam memperluas dampak program ke tingkat kelembagaan.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, M. F., Alhadi, Z., & Suryanef, S. (2019). Peningkatan kapasitas aparat pemerintahan nagari dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan Di sumatera barat. *Jurnal Penerapan IPTEKS*, *1*(1), 33-44.

Andriani, R., & Afidah, M. (2020). Evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen Universitas Lancang Kuning. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, *12*(1), 271-278

Fahma, M. F., Rafni, A., Muchtar, H., & Bakhtiar, Y. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi BUMNag dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Journal of Education, Cultural and Politics*, *4*(1), 199-208.

Fatmariza. 2015. Desentralisasi dan Representasi kepemimpinan Perempuan Minang di Ranah Publik (Analisis Peran Struktur, Kultur, dan Proses Sosial dengan Perspektif Gender). Penelitian Desentralisasi (PDUPT) PNBP UNP

Fatmariza. 2020. Model Pengarusutamaan Gender Transformatif Berbasis Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Nagari. Laporan Penelitian Kompetitif Nasional (PT). DRTPM-DIKTI.

GENDER. *Jurnal Ideologi dan Konstitusi PKP UNP*, *3*(2), 123-133.

Hati, F. S., & Kurnia, A. R. (2023). Evaluasi Skor Pre-Test dan Post-Test Peserta Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi bagi Dokter dan Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di BKKBN Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Edutrained: Jurnal Pendidikan Dan Pelatihan*, *7*(1), 67-78.

Indrawadi, J., Isnarmi, I., Montessori, M., & Tiara, M. (2021). Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan. *ABDI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, *3*(1), 11-15.

Irwan, I., Azmi, A., Syafril, R., & Tiara, M. (2021). Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Nagari Melalui Literasi Digital Anti-Hoaks dan Penguatan Ketahanan Informasi Nagari. *Abdi: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, *3*(2), 209-214.

Nurfadillah, M., Fatmariza, F., Montessori, M., & Muchtar, H. (2023). TANTANGAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN SEBAGAI KAPOLSEK DALAM PERSPEKTIF

Nurman, N., Suryanef, S., Hasrul, H., & Anggraini, R. (2019). Pelatihan tata kelola administasi nagari Bagi aparatur pemerintahan nagari Di nagari persiapan kamang tangah anam suku Kecamatan kamang magek, kabupaten agam. *Jurnal Penerapan IPTEKS*, *1*(1), 14-20.

Sari, O. P., & Mediatati, N. (2023). Students resilience: The impact of online learning policies during the COVID-19 pandemic on academic stress. *JESS (Journal of Educational Social Studies)*, *12*(1), 73-83.

Suryanef, AL Rafni. 2019. Local Government Capacity Model in Education Policy Innovation. International Journal of Innovation, Creativity and Change.

JECO